



**ANALISIS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTO MELALUI BELANJA MODAL KAWASAN  
GERBANGKERTOSUSILA**

Hani Puspitasari\*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang  
hanipuspitasari@yahoo.com*

Mohammad Khusaini

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang  
khusaini@ub.ac.id*

Farah Wulandari Pangestuty

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang  
farahpangestuty@gmail.com*

\*Alamat Korespondensi: hanipuspitasari@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Regional autonomy provides privilege for local governments to optimize resources for local revenue. Local taxes, retributions, general allocation funds and revenue sharing funds are sources of revenue for central and local government. Revenue can be used to finance capital expenditures to accelerate gross domestic regional product. The purpose of this study is to analyze the effect of taxes, retributions, revenue sharing and general allocation funds through capital expenditures on gross domestic regional product in the Gerbangkertosusila area. The research with panel data involving 7 regency/city of the Gerbangkertosusila region from 2010 to 2020. Data processing use path analysis. This research finds insignificant effect of local taxes and revenue sharing funds on capital expenditures. However, retributions and general allocation funds significantly affect capital expenditures. Local taxes and revenue sharing funds significantly affect gross domestic regional product, while retributions, general allocation funds, and capital expenditures affect insignificantly. All variables in this study through capital expenditures have insignificant effect on gross domestic regional product. Local governments need to evaluate local revenue allocation so that it has the most impact on gross domestic regional product, and solutions are needed to increase revenue through extensification and intensification of local sources of revenues.*

*Keywords: local taxes, retributions, revenue sharing, general allocation funds, capital expenditures, gross domestic regional product*

**ABSTRAK**

Otonomi daerah telah memudahkan pemerintah daerah mengurus pemerintahannya dengan memanfaatkan sumber daya dari daerahnya yang dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah yang berasal dari pendapatan daerah, serta dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang merupakan transfer dari pusat ke pemerintah daerah. Dari pendapatan tersebut digunakan untuk belanja modal yang berdampak pada percepatan produk domestik regional bruto. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh dari pajak, retribusi daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum melalui belanja modal terhadap produk domestik regional bruto Kawasan Gerbangkertosusila. Data berupa *cross sectional* data dari ketujuh Kabupaten/Kota Kawasan Gerbangkertosusila pada tahun 2010-2020. Pengolahan data menggunakan metode analisis jalur. Temuan dari penelitian menunjukkan variabel pajak daerah dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan variabel retribusi daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Pajak daerah dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto namun retribusi daerah, dana alokasi umum serta belanja modal tidak mempunyai pengaruh. Semua variabel dalam penelitian melalui belanja modal tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dalam pengalokasian pendapatan daerah agar dapat berdampak lebih

---

terhadap produk domestik regional bruto dan diperlukan solusi untuk menambah pendapatan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, belanja modal, produk domestik regional bruto

KLASIFIKASI JEL: H50, H71

CARA MENGUTIP:

Puspitasari, H., Khusaini, M., & Pangestuty, F. W. (2023). Analisis pendapatan daerah terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal kawasan Gerbangkertosusila. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(2), 171-187.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri. Penerapannya diharuskan menggunakan asas kemandirian dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah sebagai sumber pendapatan. Dari berbagai sumber dari daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan terbesar dibandingkan dengan sumber lainnya.

Pajak dan retribusi daerah berperan penting dalam perekonomian daerah, serta dianggap sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan daerah (Mutiara, 2015). Pengalokasian pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan dalam belanja yang bersifat produktif seperti belanja modal. Bai dan Li (2011) menyatakan bahwa pajak daerah jika digunakan membiayai belanja modal akan meningkatkan inovasi pemerintah sedangkan menurut Runtu di Kota Manado (2016) retribusi daerah akan memperbesar pengalokasian belanja modal.

Di sisi lain pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan membiayai otonomi daerah. Selain dana tersebut, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana bagi hasil dari pajak dan kekayaan daerah guna membantu pendapatannya. Pemerintah daerah menggunakan dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (Heliyanto & Handayani, 2016).

Belanja modal dapat digunakan untuk mendapatkan aset yang bersifat tetap seperti infrastruktur, bangunan dan aset lainnya tanpa memiliki niat untuk dijual (Ghozali & Ratmono, 2008). Selain itu, belanja modal dapat digunakan dalam pembangunan daerah yang pada akhirnya berdampak kepada perekonomian. Hal tersebut sesuai dengan teori Harrod Domar untuk mencapai kondisi perekonomian yang stabil maka perlu adanya pembentukan modal (Danar, 2016).

Indikator yang paling sering digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pembangunan ekonomi daerah adalah produk domestik regional bruto (Maulidya, 2021). Produk domestik regional bruto di suatu daerah perlu ditingkatkan agar dapat berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Selain untuk melihat tingkat dari keberhasilan pembangunan, produk domestik regional bruto juga dijadikan sebagai indikator terciptanya kesejahteraan masyarakat khususnya di era otonomi daerah. Namun, meskipun

### PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Penerapan Otonomi daerah mampu meningkatkan pembangunan daerah. Otonomi belum dapat memberikan manfaat yang banyak untuk peningkatan pendapatan asli daerah
- Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dari pengalokasian pendapatan daerah
- Dengan pembentukan Kawasan Gerbangkertosusila diharapkan dapat pemeratakan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
- Pemerintah daerah perlu melakukan upaya mengintensifikasi dan mengekstensifikasi atas pajak dan retribusi daerah

penerapan otonomi daerah sudah berlangsung cukup lama, produk domestik regional bruto di Kawasan Gerbangkertosusila masih rendah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, laju produk domestik regional bruto propinsi Jawa Timur dan Kawasan Gerbangkertosusila selama sebelas tahun terakhir mengalami fluktuasi seperti pada Grafik 1 berikut ini.

Grafik 1 Laju PDRB Propinsi Jawa Timur dan Kawasan Gerbangkertosusila (2010-2020)



Sumber: BPS Jawa Timur 2022 (data diolah)

Dengan laju PDRB di Kawasan Gerbangkertosusila yang fluktuatif seperti pada Grafik 1, dikhawatirkan akan mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan dibentuknya Kawasan Gerbangkertosusila untuk pemerataan produk domestik regional bruto. Selain itu kondisi tersebut juga menggambarkan kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerahnya. Fenomena ini memunculkan kesan bahwa pembentukan Kawasan Gerbangkertosusila di tahun 1996 belum

dapat mendorong produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Timur.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh pajak, retribusi daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap belanja modal yang telah dilakukan di antaranya adalah Natoen et al. (2020), Suryani & Pariani (2018), dan Deffi (2021). Temuan-temuan penelitian ini berbeda satu sama lain. Natoen et al. (2020), Suryani & Pariani (2018) dan Deffi (2021) yang meneliti 17 Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau menyebutkan pajak, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil mempunyai terhadap belanja modal. Sementara itu, penelitian oleh Subianto & Sipahutar (2020), Ayem & Pratama (2018) dan Abbas et al. (2021) mengungkapkan hasil yang berbeda. Subianto dan Sipahutar (2020) meneliti di Kota Lubuklinggau mengemukakan pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Ayem & Pratama (2018) & Abbas et al. (2021) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan dana alokasi umum dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Selain itu, berikut beberapa penelitian terdahulu oleh Rodriguez & Kroijer (2009), Sufardi (2019), Waryanto (2017), Datu et al. (2021) dan Budhi & Dewi (2015) menemukan pajak, retribusi daerah, belanja modal, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Rodriguez & Kroijer (2009) yang meneliti kawasan Eropa Tengah dan Timur menemukan bahwa pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sufardi (2019), Saraswati, D (2018), Datu et al. (2021) & Budhi & Dewi (2015) yang melakukan penelitian mengenai Kabupaten Sinjai, Kabupaten/Kota Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Provinsi Bali menyatakan bahwa retribusi, belanja modal, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya studi oleh Sunarto & Sunyoto (2016), Humiang et al. (2015), Widiyanto et al. (2016) serta Arina et al. (2021) menemukan hasil yang berbeda. Studi yang dilakukan Sunarto & Sunyoto (2016) yang meneliti Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain oleh Humiang et al. (2015) yang meneliti di Kota Manado dan Widiyanto et al. (2016) & Arina et al. (2021) menyatakan bahwa belanja modal, dana alokasi umum dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang menggunakan teori pertumbuhan endogen oleh Todaro & Smith (2006) mengemukakan peran pemerintah dalam

mengalokasikan penerimaan daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Barro (1990) mengemukakan pengalokasian pajak dan retribusi daerah untuk belanja produktif dalam hal ini belanja modal akan mendorong perekonomian. Dari alokasi dana yang optimal akan dapat meningkatkan perbaikan untuk layanan publik seperti infrastruktur. Selain mengacu pada teori tersebut, penelitian ini juga mengacu teori keagenan yang menggambarkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pengalokasian dana perimbangan dan teori *fiscal federalism* yang menyatakan bahwa perekonomian tercapai dengan desentralisasi fiskal sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah (Kurniawati, K., & Muzdalifah, M. (2022)). Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pajak, retribusi daerah, dana alokasi umum & dana bagi hasil melalui belanja modal terhadap produk domestik regional bruto Kawasan Gerbangkertosusila yang diduga berpengaruh positif dan signifikan. Dengan menggunakan belanja modal sebagai variabel intervening. Ruang lingkup penelitian terletak di Kawasan Gerbangkertosusila juga merupakan kebaruan dalam penelitian ini.

Pembahasan mengenai topik ini khususnya setelah diterapkannya otonomi daerah menjadi sangat menarik karena pajak dan retribusi daerah merupakan pemasukan dari daerah terbesar di antara sumber-sumber lainnya. Selain itu juga terdapat pendapatan pemerintah pusat yang berpotensi untuk dapat digunakan membiayai pengeluaran daerah. Ketika pendapatan dimanfaatkan dengan tepat, maka akan dapat meningkatkan produk domestik regional bruto melalui pengalokasian belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila. Laju produk domestik regional bruto yang mengalami fluktuasi juga merupakan masalah yang serius untuk segera ditangani oleh pemerintah, sebab Kawasan Gerbangkertosusila merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam satuan wilayah pembangunan (SWP). Dengan melalui pembentukan wilayah pembangunan tersebut diharapkan pemerintah dapat mengkonsentrasikan pembangunan dengan mengembangkan potensi wilayah agar tercapai pemerataan pembangunan antardaerah.

## STUDI LITERATUR

### Pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam Produk Domestik Regional Bruto

Pemerintah daerah diwajibkan untuk dapat mengalokasikan pendapatan daerahnya dalam belanja yang sifatnya produktif. Namun, masih

banyak pemerintah daerah yang menggunakan pendapatannya untuk kegiatan yang kurang produktif, misalnya untuk belanja barang & jasa dan belanja pegawai (Sudika & Budiarta, 2017). Sementara itu, pendapatan daerah yang digunakan dalam hal produktif, seperti belanja modal, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan Mutiara (2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah mampu memberikan dampak positif terhadap produk domestik regional bruto, dan pajak dapat digunakan sebagai modal untuk melakukan pembangunan sehingga akan mendorong perekonomian.

Teori pertumbuhan endogen pertama kali dikemukakan oleh Romer (1986) yang kemudian dilanjutkan oleh Barro (1990). Teori ini membahas pentingnya peranan pemerintah daerah untuk mengalokasikan penerimaannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Penerimaan daerah dapat digunakan untuk pengadaan barang publik, seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya sebagai bagian dari investasi. Investasi tersebut dapat digunakan oleh pihak swasta untuk meningkatkan produktivitas yang mendorong pertumbuhan perekonomian.

Selain teori pertumbuhan endogen, teori *fiscal federalism* juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan desentralisasi fiskal sesuai yang ada pada otonomi daerah. Teori keagenan juga menggambarkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian dana. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur urusan daerah masing-masing.

### **Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam PDRB**

Dalam rangka mendukung otonomi daerah, pemerintah pusat menyalurkan dana ke pemerintah daerah berupa dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Ardiansyah dan Vitalis (2014) menyebutkan bahwa DAU seringkali dianggap sebagai dana yang diberikan tanpa tuntutan penyelenggaraan program pengeluaran tertentu oleh pemerintah daerah. Untuk tujuan pemerataan kemampuan fiskal dan pembangunan pada daerah, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut agar menciptakan produk domestik regional bruto yang lebih merata. Hal ini sesuai dengan Datu et al. (2021) dan Dewi dan Budhi (2015) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum dan dana bagi hasil berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

### **Pendapatan daerah dalam otonomi daerah**

Dalam penerapan otonomi, pemerintah daerah diasumsikan lebih efisien dalam

penyediaan pelayanan publik jika dibandingkan dengan dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga mengandalkan pendapatan daerah untuk menjalankan pemerintahannya dan juga dianggap sebagai input untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah dan juga menciptakan stabilitas untuk kegiatan perekonomian daerah.

Definisi pajak, retribusi daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum dinyatakan sebagai berikut.

#### **a. Pajak daerah**

Kontribusi yang harus ditanggung oleh perseorangan atau badan hukum untuk dibayarkan ke daerah dan diwajibkan menurut undang-undang yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2010) pajak daerah memiliki ciri-ciri antara lain pajak dipungut oleh negara, pembayaran pajak masuk ke dalam kas negara, pembayar tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Menurut Mulyono (2011) dan Mahpudin et al (2020) pajak daerah juga memiliki beberapa fungsi antara lain pajak berfungsi untuk menghimpun kas guna membiayai belanja rutin, pajak berfungsi sebagai pengaturan, alat stabilitas dan pajak juga berfungsi untuk redistribusi pendapatan.

#### **b. Retribusi daerah**

Pemungutan daerah yang dipungut oleh pemerintah dari diberikannya izin, jasa dan layanan tertentu untuk memenuhi keperluan masyarakat dan badan usaha yang membutuhkan. Menurut Situmorang & Sitanggang (1994) retribusi daerah memiliki ciri-ciri akan mendapatkan kontraprestasi secara langsung setelah atau sebelum pengguna membayarkan retribusi daerahnya.

#### **c. Dana alokasi umum (DAU)**

Dana yang berasal dari dana perimbangan (APBN). Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dana ini mempunyai tujuan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. membiayai kebutuhan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

#### **d. Dana bagi hasil (DBH)**

Dana ini bagian dari dana perimbangan (APBN) yang terdiri dari pajak dan kekayaan daerah (Sumber daya alam). Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dana yang memiliki tujuan memperbaiki keseimbangan pusat dan daerah sesuai potensi daerahnya dan mendanai kebutuhan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

## Belanja modal mempercepat produk domestik regional bruto

Belanja yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap pemerintahan seperti infrastruktur, peralatan, serta aset lainnya sebagai penunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Menurut Handayani (2017) adanya belanja modal akan mempengaruhi produk domestik regional bruto, sebab pemerintah dapat mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal akan dapat memacu produk domestik regional bruto.

Keynes dalam Jhingan (2003) menjelaskan bahwa permintaan agregat yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian, sektor swasta dan pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian. Hakim & Wijayanti (2015) menganjurkan pemerintah untuk campur tangan dalam menggerakkan perekonomian sesuai dengan teori Keynes (1936), sehingga pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah yaitu belanja modal dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan nasional. Belanja pemerintah akan mengimbangi konsumsi dan investasi dan karenanya akan meningkatkan *gross domestic product* (GDP). Selain dari teori Keynes, teori Harrod Domar bahwa mensyaratkan bahwa untuk mencapai kondisi perekonomian yang stabil maka perlu adanya pembentukan modal pada negara yang bersangkutan.

## Teori pusat pertumbuhan dalam pembentukan Kawasan Gerbangkertosusila

Menurut teori kedudukan pusat oleh Christaller W (1933) dalam Fujita, Krungman, Venables (2001) menjelaskan bahwa dalam pembentukan suatu kawasan biasanya membentuk heksagonal yang menunjukkan bahwa ada garis lurus yang merupakan titik terdekat dari permukiman menuju pusat pertumbuhan, yang umumnya telah dibentuk dalam peraturan pemerintah. Sama halnya dengan pembentukan Kawasan Gerbangkertosusila yang telah dibentuk oleh provinsi setempat, yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1996 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur & Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1996 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kawasan Gerbangkertosusila (GKS) merupakan kawasan yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam satuan wilayah pembangunan (SWP). Pembentukan dari Kawasan Gerbangkertosusila (GKS) termuat dalam peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 1996 mengenai RTRW Nasional dan peraturan daerah Nomor 4 tahun 1996 tentang RTRW Nasional. Kawasan GKS dibentuk dengan tujuan untuk

memeratakan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan Gerbangkertosusila terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Mojokerto.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian kuantitatif deskriptif berguna untuk melihat besarnya pengaruh dari semua variabel sera dapat menghasilkan kesimpulan yang terlepas dari konteks situasi, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan terhadap tujuh Kabupaten / Kota Kawasan Gerbangkertosusila. Pemilihan dari Kawasan Gerbangkertosusila didasarkan pada keberadaan kawasan ini yang masuk ke dalam satuan wilayah pembangunan (SWP). Periode waktu yang menjadi obyek penelitian dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2020.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen produk domestik regional bruto, variabel independen pajak, retribusi daerah dana alokasi umum, dana bagi hasil dan variabel intervening belanja modal. Variabel produk domestik regional bruto menggunakan produk domestik regional bruto dengan dasar harga konstan. Variabel pajak, retribusi daerah, dana bagi hasil, belanja modal, serta dana alokasi umum menggunakan jumlah realisasi dari variabel-variabel tersebut.

Data yang digunakan data sekunder dengan jenis data panel yang merupakan data dari kabupaten/kota Kawasan Gerbangkertosusila dalam periode 2010-2020. Data bersumber dari BPS, DPJK, beberapa artikel, jurnal dan literatur terkait lainnya.

Data dianalisis dengan teknik analisis jalur (*path analysis*) yang diuji dengan model regresi data panel melalui software *eviews*. Namun sebelum melakukan interpretasi dari hasil regresi tersebut, maka terlebih dahulu data akan diuji dengan uji stasioneritas dengan uji unit root untuk menghindari regresi lancung (*spurious regression*) (Enders, 1995). Pada uji unit root terdapat beberapa metode diantaranya metode philip-peron (PP), metode levin, lin & chu dan augmented dickey-fuller. Dalam uji unit root pada penelitian menggunakan metode *phillips-peron* yang jika probabilitas lebih kecil dari 0.05 disebut data stasioner. Setelah itu data akan dianalisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran ke dalam bentuk uraian dari angka-angka untuk dapat dianalisis. Parameter dari statistik deskriptif menggunakan *mean*, *median*, maximum, minimum dan standart deviasi. Setelah diketahui

Tabel 1 Hasil Uji Unit Root Unit dan Uji Derajat Integrasi Panel Data Metode PP

Variabel	Level	1 <sup>st</sup> Difference <b>Prob</b>	2 <sup>nd</sup> Difference	Keterangan
X1	0.000	0.008	0.000	Stasioner
X2	0.094	0.000	0.000	Stasioner
X3	0.000	0.900	0.000	Stasioner
X4	0.014	0.000	0.000	Stasioner
Z	0.000	0.001	0.000	Stasioner
Y	0.042	0.506	0.019	Stasioner

Sumber: diolah penulis

Tabel 2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Dev	Min	Max	Data source
PDRB	24,43	1,34	21,82	26,74	BPS
Pajak daerah	18,91	1,68	15,96	22,11	DPJK
Retribusi daerah	17,58	1,08	15,85	20,14	DPJK
Dana alokasi umum	20,50	0,41	19,32	20,96	DPJK
Dana bagi hasil	18,62	0,6	17,39	20,41	DPJK
Belanja modal	19,72	0,88	17,73	21,74	DPJK

Sumber: diolah penulis

Tabel 3 Hasil Pengujian Model Persamaan 1

Jenis Pengujian	Nilai	Model terpilih
Uji Chow	chi square < 0,05	<i>Fixed effect model</i>
Uji Hausman	chi square < 0,05	<i>Fixed effect model</i>

Sumber: diolah penulis

hasil statistik deskriptif maka selanjutnya memilih estimasi model regresi yang akan ditentukan melalui *fixed, random dan common effect model*, dimana pemilihan dari tiga model tersebut ditentukan berdasarkan uji lagrange multiplier (LM), uji hausman dan uji chow. Adapun selanjutnya jika model regresi sudah terpilih akan diuji multikolinearitas dan heterokedastisitas.

Studi analisis Jalur (*Path analysis*) akan memberikan gambaran pengaruh secara tidak langsung dan langsung dengan melalui variabel intervening. Berikut persamaan regresi yang terdiri dari model 1 dan 2.

Model 1

$$\text{Ln}(Y)_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Ln}(X_1)_{it} + \beta_2 \text{Ln}(X_2)_{it} + \beta_3 \text{Ln}(X_3)_{it} + \beta_4 \text{Ln}(X_4)_{it} + \beta_5 \text{Ln}(Z)_{it} + e_{it}$$

Model 2

$$\text{Ln}(Z)_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Ln}(X_1)_{it} + \beta_2 \text{Ln}(X_2)_{it} + \beta_3 \text{Ln}(X_3)_{it} + \beta_4 \text{Ln}(X_4)_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Ln(Z) : Logaritma natural belanja modal

Ln(Y) : Logaritma natural produk domestik regional bruto

Ln(X<sub>1</sub>) : Logaritma natural pajak daerah

Ln(X<sub>2</sub>) : Logaritma natural atas retribusi daerah

Ln(X<sub>3</sub>) : Logaritma natural atas dana alokasi umum

Ln(X<sub>4</sub>) : Logaritma natural atas dana bagi hasil

α :Konstanta

β<sub>1</sub> β<sub>2</sub> β<sub>3</sub> β<sub>4</sub> β<sub>5</sub> :Koefisien regresi

e :Error term

i=1,2,3,...,7 :Cross section

t=1,2,3,...,10 : Periode Waktu

Dari kedua model persamaan regresi diatas maka dapat dibentuk model analisis jalur sebagaimana Gambar 1.

Untuk melakukan pengujian hipotesis maka diperlukan Uji Statistik t dan uji sobel test. Menurut Ghazali (2018), pengujian hipotesis dengan uji statistik t jika probabilitas lebih kecil atau sama dengan 0.05 hipotesis diterima, ketika probabilitasnya lebih besar dari 0.05 hipotesis ditolak. Selain itu, juga digunakan Uji Sobel. Menurut Arumsasi et al. (2015) hipotesis ini diuji dengan sobel *test calculator* yang memiliki kriteria yang sama dengan uji sebelumnya dengan melihat nilai signifikansi pada *one tailed probability* maupun *two tailed probabilities*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis regresi pada data panel, maka data akan di uji stasioner dengan uji unit root dengan metode philip-peron (PP). Diketahui pada uji stasioner dalam level, variabel retribusi daerah (x<sub>2</sub>) belum stasioner. Kemudian dilakukan kembali uji derajat integrasi tingkat pertama (*1<sup>st</sup> Difference*) diketahui x<sub>3</sub> dan y belum stasioner, maka diperlukan uji tingkat kedua (*2<sup>nd</sup> Difference*) yang diketahui bahwa dari semua variabel sudah stasioner seperti dalam Tabel 1.

Tabel 4 Hasil Pengujian Model Persamaan 2

Jenis Pengujian	Nilai	Model terpilih
Uji Chow	chi square < 0,05	<i>Fixed effect model</i>
Uji Hausman	chi square >0,05	<i>Random effect model</i>
Uji LM	Both < 0.05	<i>Random effect model</i>

Sumber: diolah penulis

Tabel 5 Uji Multikolinearitas untuk Model Persamaan 1 &amp;2

	X1	X2	X3	X4	z
<b>X1</b>	1,000	0,896	0,670	0,761	0,833
<b>X2</b>	0,896	1,000	0,547	0,787	0,788
<b>X3</b>	0,670	0,547	1,000	0,549	0,802
<b>X4</b>	0,761	0,787	0,549	1,000	0,712
<b>z</b>	0,833	0,788	0,802	0,712	1,000

Sumber: diolah penulis

Dalam analisis deskriptif diperoleh informasi karakteristik dari semua variabel. Adapun hasil dari statistik deskriptif dapat dilihat di Tabel 2. Diketahui pada Tabel 2 pajak daerah, mempunyai nilai minimum 15,96 dan maximum 22,11. Pajak daerah memiliki nilai *mean* 18,91 memiliki arti bahwa tingkat efisiensi penggunaan pajak daerah dalam menghasilkan *value added* pada Kabupaten/Kota adalah 18,91. Retribusi daerah mempunyai nilai minimum 15,85 nilai maximum 20,14 dengan nilai *mean* 17,58 yang berarti tingkat efisiensi penggunaan retribusi daerah dalam menghasilkan *value added* pada Kabupaten/Kota adalah 17,58. Dana alokasi umum nilai minimum 19,32 dan maximum 20,96 dengan mean 20,50 yang berarti tingkat efisiensi penggunaan dana alokasi umum dalam menghasilkan *value added* pada Kabupaten/Kota adalah 20,50. Dana bagi hasil mempunyai nilai minimum 17,39 dan nilai maximum 20,41 dengan nilai mean 18,62 yang berarti tingkat efisiensi penggunaan dana bagi hasil dalam menghasilkan *value added* pada Kabupaten/Kota adalah 18,62. Belanja modal mempunyai nilai minimum 17,73 dan nilai maximum 21,74 dengan nilai *mean* 19,72 yang artinya bahwa tingkat efisiensi penggunaan belanja modal dalam menghasilkan *value added* pada Kabupaten/Kota adalah 19,72. Pertumbuhan ekonomi juga mempunyai nilai minimum 21,82 dan nilai maximum 26,74 dengan nilai *mean* 24,43 yang berarti bahwa tingkat efisiensi penggunaan pertumbuhan ekonomi dalam menghasilkan *value added* pada Kabupaten/Kota adalah 24,43.

Selanjutnya pemilihan estimasi model Regresi. Pemilihan model terbaik pada model persamaan 1 dapat dilihat di tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 maka diperoleh uji chow untuk persamaan regresi 1 menghasilkan nilai *cross section chi-square* 0,000 atau < 0,05, maka *fixed effect model* terpilih. Setelah model terpilih dilanjutkan uji hausman untuk menentukan model terbaik antara *fixed* atau *random effect model*. Berdasarkan uji

hausman maka diperoleh 0,000 > 0,05, *fixed effect model* terpilih untuk persamaan regresi 1, sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.

Untuk persamaan regresi 2 juga dilakukan pemilihan model terbaik yang terdapat pada Tabel 4. Penentuan model terbaik dilakukan uji chow, dengan menghasilkan nilai 0,000 atau < 0,05, maka pada uji ini dipilih *fixed effect model*. Setelah terpilih akan dilanjutkan uji hausman dengan menghasilkan nilai 0,119 atau >0,05 yang berarti bahwa *random effect model*. Setelah *model* terpilih maka dilanjut uji LM untuk menentukan model terbaik antara *random* atau *common effect model*. Berdasarkan uji LM yang dilakukan maka diperoleh nilai both 0,000 atau < 0,05, yang berarti *random effect model* merupakan model terbaik dari persamaan regresi 2 sebagaimana terdapat di Tabel 4. Selain melakukan pemilihan model terbaik, selanjutnya model-model tersebut perlu di uji dengan asumsi klasik.

Pada uji multikolinearitas dapat diketahui apakah model ada korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas (Ghozali, 2018). Korelasi yang tidak ada multikolinearitas adalah jika tidak melebihi dari 0,90. Apabila korelasi lebih dari 0,90 dikatakan terdapat multikolinearitas dalam model regresi persamaan tersebut. Berdasarkan pengujian dari persamaan 1 dan 2 diperoleh nilai semua variabel tidak ada yang melebihi dari 0,90 yang berarti persamaan regresi yang dipakai terbebas dari masalah multikolinearitas, sebagaimana yang terdapat di Tabel 5.

Selanjutnya untuk mendeteksi heterokedastisitas terdapat beberapa cara diantaranya uji ARCH, uji white, uji breusch pagan Godfrey dan uji glejser (Ghozali & Ratmono, 2017). Persamaan regresi 1 dan 2 akan diuji glejser yang apabila probabilitas lebih dari 0,05 tidak ada heterokedastisitas. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan untuk persamaan regresi 1 dan 2 diperoleh nilai yang melebihi dari 0,05 atau > 0,05 tidak terdapat heterokedastisitas pada kedua

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas Model Persamaan 1

Variabel	Prob	Sig	Keterangan
X1	0,086	0,05	Tidak ada
X2	0,241	0,05	Tidak ada
X3	0,599	0,05	Tidak ada
X4	0,130	0,05	Tidak ada
Z	0,887	0,05	Tidak ada

Sumber: diolah penulis

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas Model Persamaan 2

Variabel	Prob	Sig	Keterangan
X1	0,362	0,05	Tidak ada
X2	0,554	0,05	Tidak ada
X3	0,249	0,05	Tidak ada
X4	0,489	0,05	Tidak ada

Sumber: diolah penulis

persamaan regresi tersebut, sebagaimana yang terdapat di Tabel 6 dan Tabel 7.

Selanjutnya dari pengujian hipotesis uji t, pajak daerah positif dan signifikan dengan nilai 0,262 prob 0,000 < 0,05 dan retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto dengan nilai 0,013 prob 0,657 > 0,05. Dana alokasi umum berpengaruh negatif tidak signifikan dengan nilai -0,166 prob 0,147 > 0,05 dan dana bagi hasil positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto dengan 0,094 dengan prob 0,005 < 0,05. Belanja modal positif namun tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto, dengan nilai 0,028 prob 0,359 > 0,05. Pengujian uji t untuk model regresi 1 terdapat di Gambar 2. Hasil uji t untuk variabel lain juga terdapat pada gambar 3 menunjukkan pajak daerah positif tidak signifikan nilai 0,066 prob 0,459 > 0,05 dan retribusi daerah berdampak positif signifikan terhadap belanja modal Kawasan GKS nilai 0,327 prob 0,000 < 0,05. Dana alokasi umum berdampak positif signifikan terhadap belanja modal Kawasan GKS nilai 1,499 prob 0,000 < 0,05. Dana bagi hasil memiliki arah negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal dengan nilai 0,118 dan prob 0,313 > 0,05. Pengujian hipotesis uji t terdapat di Gambar 3.

Kemudian dengan uji Sobel diketahui belanja modal bukan variabel intervening antara pajak terhadap produk domestik regional bruto Kawasan Gerbangkertosusila dengan koefisien pajak melalui belanja modal dengan nilai koefisien 0,580 dan prob 0,280 > 0,05 terhadap produk domestik regional bruto. Sebagaimana dapat dilihat di Gambar 4. Selain itu belanja modal tidak dapat menjadi intervening retribusi daerah terhadap produk domestik regional bruto di Kawasan Gerbangkertosusila dengan nilai 0,906 prob 0,182 > 0,05. Sebagaimana yang dilihat di Gambar 5.

Gambar 2 Hasil Regresi Model Persamaan 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Z	0.028	0.030	0.923	0.359
X1	0.262	0.032	8.068	2.207
X2	0.013	0.029	0.445	0.657
X3	0.166	0.113	1.465	0.147
X4	0.094	0.033	2.862	0.005
C	20.338	1.876	10.840	3.262

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.997	Mean dependent var	24.438
Adjusted R-squared	0.997	S.D. dependent var	1.343
S.E. of regression	0.067	Akaike info criterion	2.420
Sum squared resid	0.293	Schwarz criterion	2.054
Log likelihood	105.175	Hannan-Quinn criter.	2.274
F-statistic	2757.289	Durbin-Watson stat	0.645
Prob(F-statistic)	2.927		

Sumber: Diolah penulis

Gambar 3 Hasil Regresi Model Persamaan 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.066	0.089	0.744	0.459
X2	0.327	0.086	3.782	0.000
X3	1.499	0.277	5.402	8.078
X4	0.118	0.116	1.015	0.313
C	20.235	5.337	-3.791	0.000

Effects Specification

Cross-section random			
		S.D.	Rho
		0.334	0.603
		0.270	0.396

Weighted Statistics

R-squared	0.743	Mean dependent var	4.684
Adjusted R-squared	0.729	S.D. dependent var	0.532
S.E. of regression	0.277	Sum squared resid	5.525
F-statistic	52.254	Durbin-Watson stat	1.470
Prob(F-statistic)	1.423		

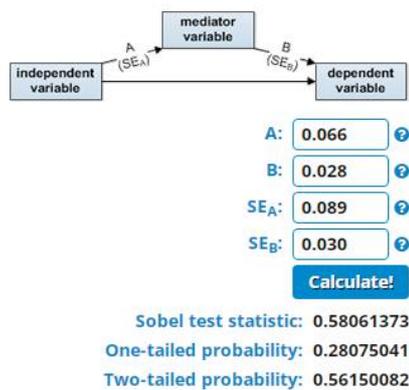
Unweighted Statistics

R-squared	0.760	Mean dependent var	19.72
Sum squared resid	14.271	Durbin-Watson stat	0.569

Sumber: Diolah penulis

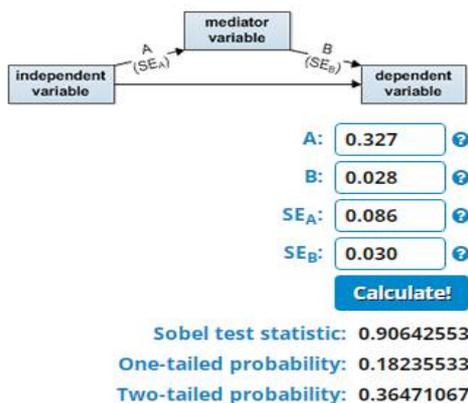
Dana alokasi umum dengan koefisien 0,919 dengan signifikansi 0,178 > 0,05 menjadikan belanja modal tidak dapat menjadi variabel intervening dana alokasi umum terhadap produk domestik regional bruto di Kawasan Gerbangkertosusila, yang dapat dilihat di Gambar 6. Dana bagi hasil dengan koefisien 0,687 dan nilai prob 0,245 > 0,05 yang menjadikan belanja modal

Gambar 4 Hasil Sobel Test Pajak Daerah



Sumber: Data diolah

Gambar 5 Hasil Sobel Test Retribusi Daerah



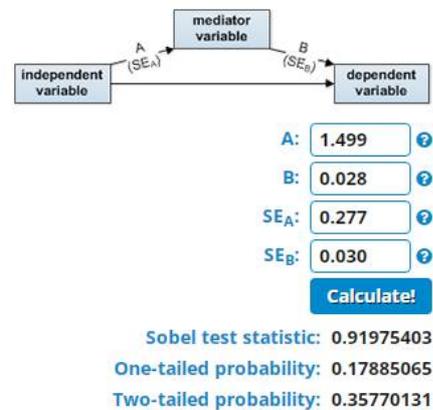
Sumber: Data diolah

tidak dapat menjadi variabel intervening dana bagi hasil terhadap produk domestik regional bruto di Kawasan Gerbangkertosusila, yang dapat dilihat pada Gambar 7.

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Kawasan Gerbangkertosusila jika ditinjau dari rasio efisiensi dan rasio desentralisasi fiskal sebagai berikut.

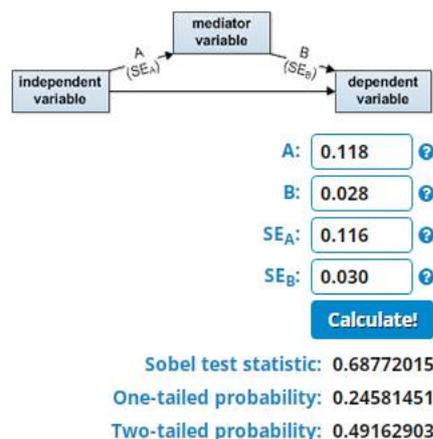
1. Kabupaten Bangkalan  
Kabupaten ini merupakan satu-satunya bagian dari Kawasan Gerbangkertosusila yang terletak di luar Pulau Jawa. Jika ditinjau dari kinerja keuangan daerah melalui rasio efisiensi diperoleh bahwa pemerintah Kabupaten Bangkalan di tahun 2010-2020 memiliki rasio efisiensi >90% atau masuk dalam kriteria kurang atau tidak efisien, yang berarti bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dinilai belum efisien dalam mengalokasikan realisasi belanja daerah

Gambar 6 Hasil Sobel Test Dana Alokasi Umum



Sumber: Data diolah

Gambar 7 Hasil Sobel Test Dana Bagi Hasil



Sumber: Data diolah

- terhadap realisasi pendapatan Kabupaten Bangkalan. Namun kinerja keuangan jika ditinjau dari rasio desentralisasi fiskal, maka diperoleh tingkat kemandirian diantara nilai 0%-20% yang berarti bahwa memiliki tingkat desentralisasi fiskal sangat kurang, dimana pemerintah Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya mampu untuk melepaskan diri dari bantuan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan desentralisasi.
2. Kabupaten Mojokerto  
Kabupaten ini terletak di sebah Kabupaten Sidoarjo, yang menjadikannya memiliki letak strategis dalam kegiatan ekspor dan impor karena berdekatan dengan bandara juanda dan pelabuhan tanjung perak. Kinerja keuangan Kabupaten ini ditinjau dari rasio efisiensi

- memiliki kriteria belum efisien. Sementara itu, jika ditinjau dari rasio desentralisasi fiskal, Kabupaten Mojokerto masih belum dapat terlepas dari bantuan pemerintah pusat.
3. Kota Mojokerto  
Kota ini terletak disebelah Kabupaten Mojokerto dan memiliki luas wilayah paling kecil diantara wilayah lainnya yang tergabung dalam kawasan Gerbangkertosusila. Kinerja keuangan Kota Mojokerto jika ditinjau dari rasio efisiensi dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kota Mojokerto belum efisien dan jika ditinjau dari rasio desentralisasi fiskal daerah bahwa pemerintah Kota Mojokerto belum bisa terlepas dari ketergantungan atas bantuan dari pemerintah pusat.
  4. Kabupaten Gresik  
Kabupaten ini terletak berdekatan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang menjadikannya sebagai kawasan yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Kinerja pemerintah Kabupaten Gresik belum efisien. Jika ditinjau dengan melalui rasio desentralisasi fiskal maka diperoleh nilai yang berada dikisaran 20%-40%, Oleh karena itu Kabupaten Gresik masuk dalam kriteria sedang dan cukup yang berarti bahwa pemerintah daerahnya sudah dapat mengurangi
  5. Kabupaten Sidoarjo  
Kabupaten ini dikenal dengan daerah penopang dari Kota Surabaya. Ditinjau dari rasio efisien, kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum efisien. Ketika ditinjau dari rasio desentralisasi fiskal, Kabupaten Sidoarjo memiliki kriteria cukup dan baik yang berarti bahwa pemerintah daerah sudah dapat mengurangi ketergantungan daerahnya dari pemerintah pusat.
  6. Kabupaten Lamongan  
Kabupaten Lamongan terletak di sisi utara Jawa Timur. Jika ditinjau dari rasio efisiensi, kinerja dari pemerintah Kabupaten Lamongan belum efisien. Sementara jika ditinjau dari rasio desentralisasi fiskal, pemerintah Kabupaten Lamongan masih bergantung dari bantuan pemerintah pusat.
  7. Kota Surabaya  
Ibukota dari Provinsi Jawa Timur yang terletak diantara Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Kinerja keuangan pemerintah Kota Surabaya jika ditinjau dari rasio efisiensi dapat disimpulkan bawa pemerintah Kota Surabaya belum efisien dalam mengalokasikan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan

Tabel 8 Hasil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Gerbangkertosusila

Tahun	Kab. Bangkalan	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kab. Lamongan	Kab. Sidoarjo	Kab. Gresik	Kota Surabaya
2011	85,31%	94,53%	93,11%	108,41%	91,20%	95,18%	99,86%
2012	67,78%	107,08%	94,03%	105,28%	96,59%	87,97%	92,77%
2013	101,52%	88,47%	89,67%	96,10%	95,35%	103,08%	96,60%
2014	93,29%	75,80%	91,59%	102,52%	91,85%	89,59%	94,30%
2015	93,85%	89,15%	98,61%	100,56%	103,00%	89,34%	98,06%
2016	106,17%	104,08%	117,10%	102,83%	99,55%	101,20%	104,77%
2017	91,83%	99,61%	94,47%	100,50%	92,65%	96,44%	98,49%
2018	102,60%	97,57%	91,05%	100,10%	96,68%	93,17%	100,02%
2019	100,22%	99,81%	96,17%	100,38%	97,75%	95,56%	104,54%
2020	98,85%	100,09%	90,79%	99,47%	100,43%	105,31%	106,46%

Sumber: Diolah penulis

Tabel 9 Hasil Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Kawasan Gerbangkertosusila

Tahun	Kab. Bangkalan	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kab. Lamongan	Kab. Sidoarjo	Kab. Gresik	Kota Surabaya
2011	5,00%	9,71%	9,58%	8,22%	24,15%	20,61%	50,19%
2012	4,46%	12,39%	10,28%	8,46%	28,89%	25,90%	49,19%
2013	6,58%	14,60%	13,16%	9,72%	31,85%	27,32%	53,32%
2014	8,28%	18,94%	15,26%	12,45%	34,07%	31,70%	54,64%
2015	9,81%	19,57%	17,95%	12,39%	35,62%	32,78%	60,97%
2016	10,92%	20,62%	18,90%	14,84%	36,40%	28,37%	59,92%
2017	14,88%	21,43%	22,79%	15,80%	41,32%	31,78%	64,25%
2018	9,80%	22,44%	20,56%	15,53%	38,90%	33,28%	60,83%
2019	11,25%	21,64%	21,75%	16,48%	38,02%	31,44%	61,40%
2020	10,89%	22,36%	26,17%	16,97%	40,77%	31,46%	56,86%

Sumber: Diolah penulis

daerahnya. Namun jika ditinjau dari rasio desentralisasi fiskal, pemerintah Kota Surabaya memiliki kriteria sangat baik yang berarti pemerintah daerah sudah dapat mengurangi ketergantungannya dari bantuan pemerintah pusat.

Hasil rasio efisiensi dan rasio desentralisasi fiskal terdapat di Tabel 8 dan Tabel 9.

### Pembahasan

Selanjutnya pengaruh pajak daerah menunjukkan arah positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kawasan Gerbangkertosusilo. Hasil penelitian sesuai teori pertumbuhan ekonomi endogen oleh Barro (1990) menjelaskan pentingnya peranan pemerintah dalam mengalokasikan pendapatan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pajak daerah akan digunakan untuk modal dalam melakukan pembelian barang publik, sementara itu barang publik tersebut akan dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga akan berpengaruh untuk peningkatan produk domestik regional bruto. Pajak daerah diterapkan untuk menjamin perekonomian yang stabil. Penelitian Rodriguez & Kroijer (2009) juga mendukung hasil analisis ini yang menunjukkan pajak positif signifikan terhadap variabel produk domestik bruto di Eropa Tengah dan Timur tahun 1990-2004. Selain itu penelitian dari Dewi dan Budhi (2018) juga mengemukakan hal yang sama didalam hasil penelitiannya.

Variabel retribusi daerah menunjukkan tanda positif tidak signifikan terhadap variabel produk domestik regional bruto di Kawasan Gerbangkertosusilo. Bertolak belakang dari yang disampaikan pada teori pertumbuhan endogen Barro (1990) yang menyatakan bahwa retribusi daerah yang termasuk dalam pendapatan daerah memiliki peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mendorong perekonomian. Penerimaan retribusi daerah masih lebih rendah dibandingkan dengan pajak daerah, sehingga membuat retribusi daerah di Kawasan Gerbangkertosusilo masih belum bisa dijadikan sebagai modal untuk meningkatkan produk domestik regional bruto. Pengalokasian retribusi daerah juga membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam prosesnya yang dimulai dari penganggaran sampai pelaksanaan yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian. Sebagai contoh retribusi daerah dialokasikan untuk pembelian tanah dan sarana dan prasarana yang akan dibangun membutuhkan beberapa waktu untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga hal ini belum mampu memberikan pengaruhnya pada produk domestik

regional bruto. Penelitian oleh Mononimbar (2017) dan Sunarto & Sunyoto (2016) di Kabupaten Minahasa dan Jawa Tengah juga mengungkapkan retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap produk domestik regional bruto.

Dana alokasi umum menunjukkan tanda negatif tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto Kawasan Gerbangkertosusilo. Hal ini terjadi karena pengalokasian untuk belanja modal yang kurang maksimal, sehingga belum berdampak pada produk domestik regional bruto. Sesuai oleh penelitian Widiyanto et al. (2016) dan Arina et.al (2021) di Kota Tegal dan Manado dana alokasi umum tidak memberikan pengaruh terhadap produk domestik regional bruto disebabkan pemberian dan pengalokasian dari dana alokasi umum tidak bersifat spesifik.

Dana bagi hasil menunjukkan arah positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto Kawasan Gerbangkertosusilo. Pemerintah pusat memberikan dana untuk pembangunan, semakin tinggi dana perolehan maka semakin tinggi tingkat pembangunan daerah (Hendriwiyanto & Nurkholis, 2015). Didukung penelitian Budhi dan Dewi (2015) dan Rahmah dan Zein (2016) di Provinsi Aceh dan Provinsi Bali.

Belanja modal menunjukkan tanda positif I, namun tidak signifikan terhadap variabel Kawasan Gerbangkertosusilo (GKS) merupakan kawasan yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam satuan wilayah pembangunan (SWP). Pembentukan dari Kawasan Gerbangkertosusilo (GKS) termuat dalam peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 1996 mengenai RTRW Nasional dan peraturan daerah Nomor 4 tahun 1996 tentang RTRW Nasional. Kawasan GKS dibentuk dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada belanja modal menunjukkan tanda positif namun tidak signifikan terhadap variabel produk domestik regional bruto Kawasan Gerbangkertosusilo. Hasil tidak sesuai dengan teori pertumbuhan Keynes (1936) dalam Hakim dan Wijayanti (2015) yang mengemukakan penerimaan belanja modal memengaruhi produk domestik regional bruto dengan bantuan campur tangan dari pemerintah dengan meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (belanja modal), sehingga hal ini akan mengimbangi konsumsi dan investasi dalam perekonomian, dan karenanya akan meningkatkan GDP. Belanja modal dibiayai oleh pendapatan yang berasal dari daerah. Semakin rendahnya anggaran pendapatan di daerah yang dialokasikan untuk belanja modal, maka tidak akan memberikan dampak pada

perekonomian daerah. Dana digunakan untuk belanja modal jauh lebih rendah dibanding untuk belanja rutin dan pegawai, sehingga hal tersebut juga dapat menyebabkan belanja modal tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan teori Harrod-Domar yang menyatakan syarat untuk mencapai kondisi ekonomi yang mantab maka memerlukan modal. Didukung penelitian Sundika dan Budiarta (2017) yang menyatakan masih banyak pemerintah daerah yang menggunakan pendapatan untuk belanja barang dan jasa dan belanja pegawai daripada belanja modal. Adapun penelitian yang sejalan dilakukan Humiang et al. (2015) di Kota Manado.

Variabel pajak daerah positif dan tidak signifikan terhadap variabel belanja modal Kawasan Gerbangkertosusilo. Hasil dari penelitian sesuai dengan manfaat dari pajak daerah yang dikemukakan oleh Mulyono (2011) dan Mahpudin et al. (2020) pada fungsi anggaran pajak daerah *budgetair* yang menyatakan bahwa pajak daerah dipergunakan untuk kas daerah yang selanjutnya digunakan dalam belanja rutin. Pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan atas belanja modal untuk daerah, sehingga hasilnya belum dapat terlihat. Hasil penelitian didukung oleh penelitian dari Subianto & Sipahutar (2020) dan Handayani et al (2015) di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Variabel retribusi daerah menunjukkan arah positif serta signifikan terhadap variabel belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusilo. Sesuai dengan ciri-ciri adanya retribusi daerah Situmorang dan Sitanggung (1994) yang menyatakan bahwa terdapat kontra prestasi secara langsung yang dapat dinikmati yang berupa pemberian izin atau layanan jasa tertentu. Kontraprestasi tersebut dapat diperoleh dengan pengalokasian retribusi daerah melalui belanja modal, seperti retribusi atas pelayanan pelabuhan dan retribusi pasar yang membutuhkan pembebasan/ pembelian atas tanah yang akan digunakan. Jadi untuk memperoleh tanah tersebut harus melakukan belanja modal. Hasil penelitian sesuai teori ekonomi keuangan negara tentang semangat undang-undang pada otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian fiskal daerah (Wahyudi & Handayani, 2015). Didukung juga oleh penelitian Natoen et al. (2020) dan Nugraha dan Dwirandra (2016) Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Pada variabel dana alokasi umum menunjukkan arah positif signifikan terhadap belanja modal Kawasan Gerbangkertosusilo. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Suryani dan

Pariani (2018) dan Vanesha et al. (2019) di Provinsi Riau, dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dana yang diberikan untuk pemerintah daerah dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah.

Pada variabel dana bagi hasil positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal Kawasan Gerbangkertosusilo. Dana bagi hasil yang diberikan sebagian besar masih dipergunakan untuk pengeluaran rutin lainnya seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Pengeluaran seperti ini menyebabkan dana tidak dapat memengaruhi belanja modal. Didukung penelitian terdahulu diantaranya oleh Pratami (2021) dan Abbas et al. (2021) di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Variabel dari pajak daerah melalui belanja modal menunjukkan tanda positif tidak mempunyai pengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Kawasan Gerbangkertosusilo. Kenaikan atau penurunan dari pajak daerah dengan diikuti oleh peningkatan atau penurunan belanja modal tidak akan mempengaruhi produk domestik regional bruto tidak sesuai dari pernyataan dari Barro. Sedangkan menurut Barro (1990) pajak daerah diharapkan untuk membiayai belanja yang sifatnya produktif seperti belanja modal. Dari belanja tersebut akan membuat peningkatan pada perekonomian suatu daerah. Pajak daerah masih dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Sehingga pajak daerah belum bisa digunakan untuk mempercepat produk domestik regional bruto daerah melalui belanja modal.

Variabel retribusi daerah melalui belanja modal menunjukkan tanda yang positif tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kawasan Gerbangkertosusilo. Rendahnya retribusi daerah yang digunakan untuk belanja modal, membuat perekonomian daerah tidak mampu berkembang pesat. Hasil dari penelitian ini bertolak belakang oleh pernyataan dari Barro (1990) yang mengemukakan ketika retribusi daerah dialokasikan untuk belanja produktif (belanja modal) akan mendorong perekonomian daerah. Dengan belanja modal mampu digunakan untuk menambah aset daerah, sehingga ketersediaan aset daerah akan menjadi lebih baik dan mencukupi, maka hal ini akan menciptakan kondisi efektif dan efisien. Namun faktanya retribusi daerah untuk belanja modal justru digunakan belanja lainnya sehingga tidak dapat memberikan pengaruhnya terhadap produk domestik regional bruto.

Variabel dana alokasi umum melalui belanja modal menunjukkan tanda positif namun tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kawasan Gerbangkertosusilo.

Pengalokasian dana alokasi umum yang digunakan untuk belanja modal masih cukup rendah, sehingga menyebabkan tidak berdampak terhadap produk domestik regional bruto. Selain itu kurangnya perencanaan dari pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan fasilitas publik dan kurangnya analisis investasi publik juga dapat menyebabkan produk domestik regional bruto tidak signifikan. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gunantara & Dwirandra (2014) di Bali dan Yuliyanti dan Atwal (2020).

Variabel dana bagi hasil melalui belanja modal menunjukkan tanda negatif tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Pengalokasian dana bagi hasil yang masih cukup rendah untuk dialokasikan dalam belanja modal menyebabkan tidak memberikan dampak pada produk domestik regional bruto. Dana yang seharusnya untuk belanja produktif justru digunakan untuk belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang&jasa dan bukan untuk belanja modal. Hasil ini juga didukung oleh Anwar (2017) di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan melihat hasil analisis maka diperoleh pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap produk domestik regional bruto. Ketika pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran yang produktif maka akan mendorong produk domestik regional bruto. Akan tetapi dana alokasi umum dan retribusi tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto, karena dari penerimaannya lebih rendah jika membandingkannya dengan sumber pendapatan daerah lainnya dan pengalokasian yang kurang spesifik untuk peruntukannya. Dana bagi hasil memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkat dana bagi hasil yang diberikan maka semakin banyak pembangunan infrastruktur daerah. Sementara rendahnya belanja modal oleh daerah menyebabkan pengeluaran ini tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto.

Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal Kawasan Gerbangkertosusila. Hal tersebut menyiratkan pajak di Kawasan tersebut masih dipergunakan untuk mengisi kas daerah yang selanjutnya dipergunakan membiayai belanja rutin. Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Retribusi dibayarkan langsung oleh masyarakat akan dialokasikan melalui belanja modal untuk digunakan membeli hal-hal yang dibutuhkan masyarakat guna mendukung aktivitas ekonomi mereka. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal Kawasan Gerbangkertosusila. Dana digunakan pemerintah

daerah membiayai kebutuhan daerahnya termasuk belanja modal. Sementara dana bagi hasil tidak berpengaruh. Dana dari pemerintah pusat sebagian besar masih dipergunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang & jasa.

Pajak, retribusi daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum tidak berpengaruh produk domestik regional bruto melalui belanja modal. Pengalokasian pendapatan daerah melalui belanja modal masih belum spesifik dan belum optimal, sehingga belum dapat berdampak ke produk domestik regional bruto.

Pada implikasinya pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebagian besar belum dialokasikan untuk hal yang sifatnya produktif, sehingga tidak dapat meningkatkan perekonomian di Kawasan Gerbangkertosusila. Selain itu jika dilihat dari tingkat kemandirian daerah, semua Kabupaten/Kota Kawasan Gerbangkertosusila memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi ke pemerintah pusat. Maka pemerintah disarankan untuk melakukan evaluasi dalam mengalokasikan pendapatan daerah dan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara ekstensifikasi & intensifikasi pendapatan daerah.

## REFERENSI

- Abbas, D. S., Sari, S. Y., Hakim, M. Z., Zulaecha, H. E., & Rachmania, D. (2021). Sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai pemoderasi antara dana perimbangan, dana bagi hasil, dan pajak daerah terhadap belanja modal. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 316-331. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4058>
- Anwar, S. (2017). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2009-2015)*. Tesis, Tidak Dipublikasikan, Universitas Bengkulu.
- Ardiansyah & Vitalis, A. W. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akuntansi* 17.
- Arumsasi, D., Khafid, M., & Sucihatiningsih, D. W. P. (2015). Pengaruh tingkat kecerdasan, motivasi, tingkat sosial ekonomi dan kemampuan adaptasi lingkungan siswa sebagai variabel *intervening* terhadap prestasi

- belajar ekonomi kelas x sma negeri 1 Mranggen tahun 2014. *Journal of Economic Education*, 4(2).
- Arina, M. M., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(3), 26-35.
- Ayem, S., & Pratama, D. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169-182. <https://doi.org/10.26460/ad.v2i2.2987>.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2010-2020*. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/05/28/2145/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-persen-2017-2020.html>
- Bai, J., & Li, J. (2011). Regional innovation efficiency in China: The role of local government. *Innovation*, 13(2), 142-153. <https://doi.org/10.5172/impp.2011.13.2.142>
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogeneous growth. *Journal of political economy*, 98(5, Part 2), S103-S125. <https://doi.org/10.1086/261726>
- Bania, N., Gray, J. A., & Stone, J. A. (2007). Growth, taxes, and government expenditures: growth hills for US States. *National Tax Journal*, 60(2), 193-204. <https://doi.org/10.17310/ntj.2007.2.02>
- Budhi, I., & Dewi, N. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(11), 1328-1444.
- Christaller, W. (1933). *Central place in Southern Germany*. Terjemahan oleh C.W. Baskin 1966. New Jersey: Prentice-Hall.
- Daniar, E. (2016). *Pengaruh belanja modal dan tenaga kerja terserap terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, Universitas Airlangga.
- Datu, I. F., Engka, D. S., & Rorong, I. (2021). Analisis pengaruh dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Deffi, L. (2019). *Analisis dampak pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Tesis, Tidak Dipublikasikan, Universitas Bung Hatta.
- Dewi, J. K., & Budhi, M. (2018). Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 1695-1722. <https://doi.org/10.24843/EEB.2018.v07.i06.p08>
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2021). *Realisasi APBD ringkasan & belanja tahun 2010-2020 Provinsi Jawa Timur*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Enders, W. (1995). *Applied econometric time series*. New York: John Wiley & Sons, inc.
- Fujita, M., Krugman, P., & Venables, A. (2001). *The spatial economy: Cities, regions, and international trade*. London: The MIT Press.
- Gunantara, P., & Dwirandra, A. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 529-546.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. 2008. *Akutansi keuangan pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 25 (edisi 9)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika: teori, konsep, dan aplikasi dengan evIEWS 10*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hakim, L., & Wijayanti, A. (2015). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Handayani, S. P., Abdullah, S., & Fahlevi, H. (2015). Pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

- Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(2).
- Handayani, T., Susetyo, D., & Saleh, M. S. (2017). Pengaruh belanja modal, infrastruktur dan indeks pembangunan manusia terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 92-100.
- Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(3).
- Hendriwiyanto, G., & Nurkholis. (2015). Pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja langsung dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Humiang, M., Rumat, V., & Tumangkeng, S. (2015). Analisis pengaruh investasi swasta, belanja modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(01).
- Jhingan, M. (2003). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. United Kingdom: Macmillan Cambridge University Press.
- Kurniawati, K., & Muzdalifah, M. (2022). Pengaruh PAD dan DAU melalui belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2018). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(1), 16-28.
- Mahpudin, E., Suhono & Kosasih. (2020). *Perpajakan pajak terapan brevet a&b*. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Mardiasmo. (2010). *Dasar-dasar perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Maulidya, R. (2021). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (studi pada seluruh provinsi di Indonesia Tahun 2015–2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Mononimbar, R. (2017). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel intervening di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 17(02).
- Mulyono, D. (2011). *Panduan brevet pajak*. Yogyakarta: ANDI.
- Mutiara, D. (2015). Pajak daerah dan pengaruhnya terhadap pdrb di Propinsi Kalimantan Timur. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i1.2296>
- Nainggolan, B., & Hasugian, V. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatera Utara periode 2016-2018. *Jurnal Akrab Juara*, 5(1), 138-149.
- Natoen, A., Ardiani, S., Nouvanti, F., Prasetyo, G., & Safitri, M. D. (2020). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(2), 158-168. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4269854>
- Nugraha, I., & Dwirandra, A. (2016). Kemampuan pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DBH pada belanja modal. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(1), 284-311.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 1996 Tentang RTRW Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 1996 Tentang RTRW Nasional.
- Pratami, V. D. (2021). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (studi kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017)*. Skripsi, Tidak Dipublikasikan, STIE Ekuitas.
- Rahmah, A. R., & Zein, B. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 213-220.
- Rodriguez, P. A., & Kroijer, A. (2009). Fiscal decentralization and economic growth in Central and Eastern Europe. *Growth and change*, 40(3), 387-417. <https://doi.org/10.1111/j.14682257.2009.00488.x>
- Romer, Paul. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of political economy*, 94(5), 1002-1037. <https://www.jstor.org/stable/1833190>

- Runtu, V. G. (2016). Pengaruh pajak dan retribusi terhadap belanja modal Kota Manado (periode 2005-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan sebagai pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Situmorang, V.M., & Sitanggang, C. (1994). *Hukum administrasi pemerintahan di daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subianto, S., & Sipahutar, F. Y. (2020). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. *Jurnal Interprof*, 6(2), 103-115. <https://doi.org/10.32767/interprof.v6i2.1164>.
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada belanja modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 1689-1718. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p30>
- Sufardi, S. (2019). Analisis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai ditinjau dari faktor pajak dan retribusi daerah. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 2(2), 174-181. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v2i2.428>
- Sunarto & Sunyoto, T. (2016). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah (studi empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Dharma Ekonomi*, 23(43), 13-22.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *PEKA*, 6(1), 11-22.
- Todaro, M. P., & Stephen, C. Smith. (2015). *Economic development "twelfth edition"*. United States of America: Pearson Education Limited.
- Undang-undang nomor 28 tahun 2009. Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27-36. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609>.
- Wahyudi, M. V., & Handayani, N. (2015). Pengaruh pajak, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap alokasi anggaran belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(11).
- Widiyanto, A., Sedyautami, E. U., & Nurmansyah, A. L. (2016). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan (studi kasus pada Kota Tegal). *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 5(2). <http://dx.doi.org/10.30591/monex.v5i2.417>
- Yolanda, C., & Zulkarnain, M. (2019). Analisis pengaruh belanja modal dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 105-117. <https://doi.org/10.0123/jse.v3i2.1885>
- Yuliyanti, S., & Atwal, A. A. (2020). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening (studi empiris pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)*, Disertasi, Tidak Dipublikasikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.